

## **BAB 5**

### **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2018–2023 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Visi tersebut didukung oleh berbagai misi berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, rencana pembangunan kedepan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan tetapi lebih kepada sumber daya alam terbarukan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan keseimbangan tersebut melalui model pembangunan ekonomi hijau dengan dimensi-dimensi penting antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata (inklusif), ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pada setiap tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 terdapat Penekanan 5 tahunan. Penekanan 5 Tahunan tersebut menjadi acuan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut adalah penekanan 5 tahunan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur:

**Tabel 5.1**

**Tahapan 5 Tahun RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur**

<b>Penekanan 5 Tahun Pertama (2005-2008)</b>	<b>Penekanan 5 Tahun Kedua (2009-2013)</b>	<b>Penekanan 5 Tahun Ketiga (2014-2018)</b>	<b>Penekanan 5 Tahun Keempat (2019-2023)</b>
<p>Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi; pengembangan ekonomi diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat banyak; infrastruktur dasar lebih mendukung arah pengembangan kawasan prioritas; pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan lebih efisien dan efektif, dan hukum lebih diutamakan; serta penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan.</p> <p><b>Keyword: Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar</b></p>	<p>Penguatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir. Lingkungan mulai terkendali. Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah, Pelaksanaan pembangunan makin menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan partisipasi yang makin meningkat serta penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah.</p> <p><b>Keyword: Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan.</b></p>	<p>Kualitas SDM semakin meningkat, kebergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan mulai berkurang, sedangkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang, dan struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman, pemerintahan berjalan makin efisien, efektif, dan transparan. Selanjutnya penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan secara global semakin terkendali dan terus meningkat kualitasnya.</p> <p><b>Keyword: Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun.</b></p>	<p>Peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.</p> <p><b>Keyword: Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita.</b></p>

Pada periode 2018-2023, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan ke-4 memiliki penekanan pembangunan yaitu: “Peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan

efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi”. Penekanan tersebut mengharapkan pemerintah daerah maupun masyarakat berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan pembangunan daerah. Pada kondisi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan guna mengoptimalkan potensi daerah.

#### A. Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur, selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur kedepan ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

**“Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

**Tabel 5.2.**  
**Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan**  
**RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023**

<b>Visi RPJPD 2005-2025</b>	<b>Visi RPJMN 2015-2019</b>	<b>Visi RPJMD 2018-2023</b>
Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan	Terwujudnya Indonesia yang <b>Berdaulat</b> , Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong	Berani untuk Kalimantan Timur yang <b>Berdaulat</b>

Berikut adalah penjelasan visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023:

**Tabel 5.3.**  
**Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023**

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat	Berani	Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat
	Berdaulat	Kalimantan Timur memiliki <b>kemantapan</b> dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan <b>kemandirian</b> dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan <b>kemandirian</b> dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
		Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki <b>daya saing</b>

## **B. Misi Daerah**

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Guna mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;

3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

**Misi 1 : Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas**

Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumber daya manusia. Kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu daerah untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Provinsi Kalimantan Timur harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berupa pengembangan pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Timur baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di luar sekolah. Peran serta perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas semakin ditingkatkan. Namun, sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia berakhlak mulia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk karakter masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan perwujudan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur bersifat komprehensif yang telah mempertimbangkan baik aspek jasmani (sandang, pangan dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan mental dan spiritual)

sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.

## **Misi 2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan**

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak beberapa dasawarsa telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang kokoh dan berkualitas. Dalam hal penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor primer. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih mengandalkan produk barang mentah (*raw material*) dan belum pada barang olahan (*processed product*). Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi persoalan dalam kegiatan ekonomi Kalimantan Timur. Kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur relatif masih tinggi. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, pendidikan, dan berbagai modal lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini. Rasio Gini Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun 2013-2017 berfluktuasi dan memperlihatkan kecenderungan stabil pada angka 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga relatif masih melebar.

Dalam konteks mewujudkan daya saing ekonomi, tantangan yang dihadapi adalah membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang. Percepatan transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan

permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan upaya keras yang terintegrasi mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, perikanan dan kelautan, peternakan.

Hal yang ingin dicapai dalam konteks ekonomi yang berkerakyatan dalam misi kedua adalah terciptanya sistem ekonomi partisipatif yang meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Upaya bantuan modal usaha, pendampingan teknis dan manajerial, serta bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah akan semakin ditingkatkan.

Ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya dan strategi untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dan pengembangan ekonomi harus berakar pada ekonomi kerakyatan namun tetap mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan peningkatan sumber daya manusia dengan cara mempercepat proses perubahan dari masyarakat yang masih berfikir dan berperilaku tradisional ke masyarakat modern; dari sistem ekonomi subsistem ke ekonomi pasar; dan dari masyarakat yang tergantung ke masyarakat yang mandiri.

Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomotif melainkan pada paradigma fondasi. Artinya, peningkatan kesejahteraan tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing, dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, usaha pertanian rakyat, serta peran koperasi sejati yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi dalam melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh

semua, untuk semua, dan dibawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota masyarakat.

Dalam konteks energi terbarukan, misi ini tidak terlepas dari konsep pembangunan ekonomi hijau. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar pembangunan dengan fokus pada transformasi dari sektor primer ke struktur ekonomi berbasis sekunder dan tersier. Di masa mendatang, Provinsi Kalimantan Timur akan mendorong lahirnya industri hilir agar hasil eksploitasi sumber daya alam yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur tidak diekspor dalam bentuk mentah namun sudah dalam bentuk produk olahan baik berupa barang setengah jadi maupun barang jadi, memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan serta mewujudkan ketahanan energi.

### **Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan**

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur secara merata. Kualitas infrastruktur yang belum memadai menjadi problem daya saing di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah, dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada jalan provinsi dan jalan produksi lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra produksi dan



kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet. Penyediaan transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dikembangkan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, dan Penyediaan perumahan sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

#### **Misi 4 : Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**

Transformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Sebagai upaya untuk mendukung ekonomi hijau, maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan, rasionalisasi dan harmonisasi penataan ruang (RTRW) untuk memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan ekosistem menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kualitas lingkungan menjadi salah satu upaya *balancing* terhadap pembangunan ekonomi agar berdimensi “berkelanjutan”. Fenomena iklim saat ini tidak bisa terprediksi sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang. Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat juga harus terlibat langsung dalam

upaya menjaga dan merawat lingkungan di masa perubahan iklim yang tidak menentu ini.

**Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.**

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar *good governance*. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Setidaknya ada Sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu; 1) Tidak ada korupsi; 2) Tidak ada pelanggaran hukum; 3) APBD baik; 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik; 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap; 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik; 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif; 8) Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah; dan 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan harmonisasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah

provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

### C. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi dioperasionisasikan menjadi rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan memperlihatkan operasionalisasi upaya pencapaian misi, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD**  
**Visi ; Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat**

No.	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	<b>Tujuan 1 :</b> Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing	IPM	75,12	75,30	75,43	75,56	75,76	76,87	76,87
			Indeks Kebahagiaan	73,57	73,59	73,60	73,65	73,67	74,00	74,00
		<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	28,81	27,02	25,72	24,70	24,40	23,13	23,13
		<b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,70	73,73	73,76	73,80	74,45	75,00	75,00
		<b>Sasaran 3:</b> Meningkat dan meratanya akses, kualitas dan relevansi pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	9,36	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80	9,80
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49	13,89	14,13	14,34	14,73	14,96	14,96
		<b>Sasaran 4:</b> Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	56,64	58,20	63,64	67,31	69,78	71,74	71,74

No.	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
		<u>Sasaran 5:</u> Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56,33	56,74	57,23	57,82	58,27	58,86	58,86
		<u>Sasaran 6:</u> Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,91	6,87	6,80	6,75	5,75	5,00	5,00
2.	Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	<u>Tujuan 1:</u> Meningkatkan ekonomi kerakyatan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,03	6,00	5,94	5,87	5,78	5,70	5,70
		<u>Sasaran 1:</u> Peningkatan Pemberdayaan masyarakat miskin dalam kemandirian berusaha	Proporsi penduduk miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (%)	15,45	15,75	16,00	16,25	16,55	16,80	16,80
		<u>Sasaran 2:</u> Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	Nilai Tambah Pertanian (Nilai Tukar Petani)	97,60	98,51	99,80	100,34	106,47	110,31	110,31
		<u>Sasaran 3:</u> Meningkatnya usaha ekonomi rakyat	jumlah UMKM yang aktif (unit)	308.623	308.823	309.023	309.223	309.423	309.623	309.623
		<u>Tujuan 2:</u> Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
			Pertumbuhan ekspor produk non migas (%)	31,50	31,60	31,70	31,80	31,90	32,00	32,00
		<u>Sasaran 1:</u> Terwujudnya hilirisasi hasil pengolahan sumberdaya alam	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan dan jasa (%)	25	26	27	28	29	30	30

No.	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
		<b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya output ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	7,96	8,00	8,20	8,3	8,4	8,5	8,5
3.	Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan	<b>Tujuan 1:</b> Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,330	0,328	0,325	0,320	0,310	0,300	0,300
			Inflasi	3,61	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
		<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Energi Daerah	Rasio elektrifikasi (%)	88,88	89,34	90,00	90,21	90,72	92,00	92,00
		<b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air bersih yang dikelola secara aman (%)	60,23	61,50	62,50	64,00	65,00	68,00	68,00
		<b>Sasaran 3:</b> Meningkatnya konektivitas antar kawasan dan daerah 3T	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (Kawasan)	2	2	2	2	3	5	5
4.	Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan	<b>Tujuan 1:</b> Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,64	82,68	82,70	82,72	82,82	82,85	82,85
		<b>Sasaran 1:</b> Menurunnya emisi GRK	Emisi GRK(ton Co2e)	1.515	1.464	1.328	1.280	1.190	1.065	1.065
		<b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya kualitas Sumber Air Baku	Indeks Kualitas air	74	74,2	74,5	75	75,5	76	76
		<b>Sasaran 3:</b> Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana	0,73 (Tinggi)	0,67	0,58	0,52	0,47	0,40	0,40

No.	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
5.	Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.	<b>Tujuan 1 :</b> Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	BB	BB
		<b>Sasaran 1 :</b> Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Sakip	77,49	78,52	80,30	81,63	83,50	85,00	85,00
		<b>Sasaran 2 :</b> Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,56	81,23	82,22	83,43	84,65	85,58	85,58
		<b>Sasaran 3 :</b> Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Persepsi Korupsi	5,56	5,50	5,60	6,65	6,69	7,45	7,45